

PEMBINAAN GENERASI MUDA MELALUI MEDIA MASSA SEBAGAI STRATEGI PEMBANGUNAN DEMOKRASI

Oleh: R. Margono *)

ABSTRAK

Pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dukungan manusia yang berkualitas, khususnya dari generasi muda, diperlukan guna mencapai tujuan pembangunan tersebut.

Disamping itu, dukungan media massa dalam pembangunan pada era globalisasi dan informasi ini sangat penting. Media massa dapat menumbuhkan suasana yang kondusif bagi pembangunan demokrasi. Pembinaan generasi muda perlu diarahkan pada usaha mewujudkan kesadaran akan kewajiban warga negara sebagai kader penerus perjuangan bangsa, untuk mengisi pembangunan nasional. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui media massa.

Generasi muda yang mampu mengemban tugas demokrasislah yang diharapkan bangsa Indonesia baik sekarang maupun untuk masa mendatang.

Pendahuluan

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai (GBHN; 1988, 1993).

Selain itu, pembangunan nasional merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan 17-8-1945 dan sekaligus merupakan pengamalan Pancasila. Dalam rangka ini manusia dan khususnya generasi muda merupakan pelaku pembangunan yang utama. Oleh karena itu berbagai usaha pembangunan harus bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi harus ditempuh melalui proses pendidikan dan pengembangan. Pengembangan sumber daya manusia adalah proses transformasi potensi manusia menjadi kekuatan efektif untuk mencapai tujuan tertentu melalui pendidikan berjenjang, latihan kerja dan pengembangan di tempat kerja secara terpadu (Menko Polkam, 1990 : 8).

Terdapat tiga syarat untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu:

1. Motivasi pengabdian yang kuat dan ber-sumber pada perjuangan bangsa yang berdasarkan Pancasila. Motivasi ini harus didasari oleh disiplin, etos kerja, dan mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini lebih baik dari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini.

*) Penulis adalah Guru Besar Ilmu Komunikasi pada FISIP Universitas Lampung.

2. Ketrampilan dan profesionalisme yang mutakhir sesuai perkembangan kemajuan pengetahuan dan teknologi.
3. Hubungan kerja dan lingkungan kerja yang harmonis baik dalam lingkungan pemerintah, swasta maupun organisasi sosial kemasyarakatan.

Strategi Pembinaan Generasi Muda sebagai Usaha Pengembangan Sumber Daya Manusia Syarat Mutlak Dalam Pembangunan

Dukungan manusia yang semakin berkualitas, khususnya dari generasi mudanya diperlukan guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Generasi muda adalah harapan bangsa dan sekaligus penerus cita-cita bangsa. Pembinaan generasi muda harus lebih diarahkan pada usaha mewujudkan kesadaran akan kewajibannya sebagai kader penerus bangsa untuk mengisi kemerdekaan (Repelita V, Buku II: 582).

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam kerangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah (misalnya pangan, sandang, perumahan dan sebagainya), tetapi juga kebutuhan batiniah (misalnya pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab, rasa keadilan dan sebagainya). Kebutuhan lahiriah dan batiniah harus terpenuhi secara selaras, seimbang dan serasi dan pelaksanaan pembangunan ini harus merata seluruh tanah air, dan bukannya untuk suatu golongan tertentu (Margono, 1996).

Selain itu, pembangunan di Indonesia dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, yang menghendaki keselarasan dalam hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia dengan lingkungan alam sekitarnya, keselarasan dan keserasian hubungan antar bangsa-bangsa, dan keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dan mengejar kebahagiaan di akhirat.

Pembangunan nasional harus berjalan bersama-sama dengan pembinaan dan pemeliharaan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang ekonomi. Kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat dan kegoncangan dalam bidang ekonomi akan menghambat pembangunan. Agar pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cepat, maka pembangunan harus dibarengi dengan pengaturan pertumbuhan jumlah penduduk melalui program keluarga berencana yang berhasil. Kegagalan pelaksanaan keluarga berencana akan mengakibatkan hasil pembangunan menjadi tidak berarti dan dapat membahayakan kehidupan generasi muda mendatang.

Pembangunan dalam bidang politik (dalam negeri) harus diarahkan pada kemantapan kesadaran kehidupan politik dan kenegaraan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bagi setiap warga negara. Sehingga pembangunan di bidang politik dapat menjamin kelancaran usaha pencapaian tujuan nasional. Guna mencapai tujuan nasional, maka perlu diciptakan kondisi yang *favorable*, sehingga memungkinkan terlaksananya proses pembaharuan kehidupan politik yang demokratis, stabil, dinamis, efektif dan efisien yang dapat memperkuat kehidupan konstitusional dan terwujudnya pemerintahan yang baik, berwibawa dan berkemampuan.

Terkait dengan hal tersebut, maka pembinaan generasi muda penting untuk dilakukan. Pembinaan generasi muda perlu diarahkan pada usaha mewujudkan kesadaran akan kewajiban warga negara sebagai kader penerus perjuangan bangsa, untuk mengisi pembangunan nasional. Generasi muda yang berkualitas harus mampu membina masa depannya yang sehat, tangguh dan bertanggung jawab, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air, dan persatuan bangsa, demokratis serta memiliki pandangan rasional yang terpadu dengan ketinggian

moral berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Peranan Media Massa Dalam Pembangunan Demokrasi

Keberhasilan dari pencapaian tujuan pembangunan memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Dukungan yang dimaksud salah satunya adalah media massa (pers, televisi, dan lain-lain), dan proses komunikasi massa yang positif. Indikasi semacam ini terjadi seiring dengan kian meningkatnya peran media massa itu sendiri sebagai suatu institusi penting dalam kehidupan masyarakat. Kondisi objektif semacam ini ditopang oleh beberapa teori (McQuail, 1987):

1. Media massa merupakan industri yang berubah dan berkembang yang menciptakan lapangan kerja, barang dan jasa, serta menghidupkan industri lain yang terkait. Media juga merupakan industri tersendiri yang memiliki peraturan dan norma-norma yang menghubungkan institusi tersebut dengan masyarakat dan institusi sosial lainnya, dan di lain pihak institusi media diatur oleh masyarakat.
2. Media massa merupakan sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya.
3. Media massa merupakan forum yang semakin berperan untuk menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat baik yang bertaraf nasional maupun internasional.
4. Media massa seringkali berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan manusia, bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol, tetapi juga dalam pengembangan tata cara, mode, gaya hidup, norma-norma dan sumber daya manusia.
5. Media massa telah menjadi sumber dominan, bukan saja bagi individu untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat dan

khalayak secara kolektif, media massa menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan.

Kita sadar bahwa pada dasarnya masyarakat dibentuk oleh kekuatan, baik yang ada di dalam maupun di luar kelompok masyarakat. Kekuatan-kekuatan tersebut bilamana perlu saling menarik pengaruh, yang diwarnai oleh konflik dan ketegangan laten. Dalam kaitan ini, media massa ikut berperan aktif sebagai penyalur (desiminator). Namun demikian, sejarah menunjukkan bahwa berbagai kekuatan yang berperan dalam masyarakat ternyata lebih kuat perannya bila dibandingkan dengan pengaruhnya media massa. Pada dasarnya media massa tergantung pada pendayagunaan kekuasaan oleh unsur kekuatan lain.

Pada era globalisasi dan informasi inilah manusia dituntut semakin ketat terhadap kesadarannya sendiri untuk selalu memperoleh informasi demi peningkatan kualitas dirinya sendiri. Hidup pada era globalisasi yang telah memasuki seluruh bidang kehidupan manusia sungguh dituntut kemampuan yang prima, dan manusia yang berkualitas primalah yang mampu menguasai dunia.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang prima tidak hanya didapat dari pendidikan formal saja, namun dapat juga diraih melalui pendidikan non formal, dimana salah satu bentuknya adalah terpaan media massa (Hamijoyo, 1972; Effendy, 1990).

Media massa dapat menumbuhkan suasana yang kondusif bagi pembangunan, dan media massa dapat menumbuhkan motivasi serta menggerakkan warga masyarakat untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, supaya partisipasi khalayak lebih bermakna khususnya bagi generasi muda, media massa dituntut untuk menyajikan berbagai macam informasi dan pengetahuan bagi mereka. Penyajian dalam tindakan karya nyata yang bermanfaat bagi bangsa dan negara diwadahi melalui sistem demokrasi.

Generasi muda yang mampu mengemban tugas demokrasi yang diharapkan oleh bangsa Indonesia, baik pada masa kini, maupun pada masa mendatang. Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Suatu hal yang tidak dapat disangkal adalah beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan dicantumkan dalam penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan Negara, yaitu:

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machsstaat).
2. Sistem Konstitusional

Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme. Berdasarkan dua istilah "Rechtsstaat" dan "Sistem Konstitusi", maka jelaslah bahwa demokrasi menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 ialah demokrasi konstitusional. Selain itu, corak khas demokrasi Indonesia yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Ciri khas demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi. Sekalipun demokrasi baru pada akhir abad ke 19 mencapai wujud yang konkrit, tetapi dia sebenarnya sudah mulai berkembang di Eropa dalam abad ke 15 dan 16.

Demokrasi pada dasarnya tidak merupakan sesuatu yang statis. Pada abad ke 20, terutama sesudah perang dunia II, negara demokratis telah melepaskan pandangan bahwa peranan negara hanya terbatas pada mengurus kepentingan bersama. Sekarang dianggap bahwa negara turut bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan karena itu harus aktif berusaha untuk menaikkan taraf kehidupan warga negaranya. Gagasan ini dituangkan dalam konsep mengenai welfare state (negara kesejahteraan). Demokrasi pada abad ke 20 tidak lagi membatasi diri pada aspek politik saja seperti abad 19, tetapi meluas mencakup juga segi-segi ekonomi sehingga demokrasi menjadi demokrasi ekonomi.

Terdapat beberapa nilai-nilai demokrasi (*values of democracy*), yaitu:

- (1) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
- (2) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
- (3) Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur.
- (4) Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
- (5) Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku.
- (6) Menjamin tegaknya keadilan.

Guna melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga:

- (1) Pemerintah yang bertanggung jawab.
- (2) Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia serta atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi.

- (3) Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik.
- (4) Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
- (5) Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Daftar Pustaka

- Effendy, Onong Uchjana, 1990. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Hamijoyo, Santoso, S. 1972. Aplikasi Model Komunikasi dari pada Perubahan Sikap dalam Research Pembangunan Masyarakat Pedesaan, *Re-Interpretasi Beberapa Data*. BPP DIKBUD, Jakarta.
- Margono, SP.R. 1996. Pengaruh Komunikasi Interpersonal Terhadap Partisipasi Pembangunan Masyarakat pada Partisipan Organisasi Kemasyarakatan *Disertasi yang tidak dipublikasikan*. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.
- Mc Quail, Dennis, 1987. *Mass Communication Theory*. Longman, Inc., New York.
- RI. *Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Sudomo. 1990. Prospek Pembangunan Politik dan Keamanan Menjelang Tinggal Landas dan Implikasinya terhadap Kualitas Manusia dan Pendidikan. *Pengarahan Menko Polkam di depan Temu Karya Pendidikan II - ISPI*, Jakarta, 5 Juli 1990.